



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105,
Telp. 0298-595259, Fax. 0298- 593844 AMBARAWA
Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>,
e-mail : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

@2021

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</u> Jumlah Responden Pencari Keadilan x100%</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah Jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari}}{\text{Jumlah Putusan yang menarik masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	miskin dan terpinggirkan		Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Jumlah perkara yang diselesaikan outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan	e. Persentase Putusan Perkara	<u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan

	terhadap putusan pengadilan.	Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%		Laporan Tahunan
			Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap		

**INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1	Meningkatnya penyerapan anggaran DIPA 01 DIPA 04	Prosentase penyerapan anggaran yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah DIPA yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Realisasi Belanja DIPA untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya terlaksananya ketertiban laporan administrasi keuangan	Prosentase terlaksananya ketertiban laporan administrasi keuangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan administrasi keuangan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindaklanjut laporan administrasi keuangan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya terlaksananya ketertiban laporan administrasi BMN	Prosentase terlaksananya ketertiban laporan administrasi BMN	$\frac{\text{Jumlah Laporan administrasi BMN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindaklanjut laporan administrasi BMN untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Terealisasinya Kebersihan lingkungan kerja	Terealisasinya Kebersihan lingkungan kerja	$\frac{\text{Jumlah Laporan kebersihan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan kebersihan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5	Meningkatnya Tercapainya kedisiplinan pegawai.	Tercapainya kedisiplinan pegawai.	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu,	Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu, Maksimal minggu pertama bulan Januari	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Meningkatnya Terealisasinya Pengawasan Bidang pada masing-masing unit.	Terealisasinya Pengawasan Bidang pada masing-masing unit.	$\frac{\text{Laporan Pengawasan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan triwulanan dan Laporan Semesteran

Ketua
Pengadilan Agama Ambarawa

ISHAK LUBIS, S.Ag
NIP.19690622.199703.1.001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan</u> Jumlah sisa Perkara yang diproses x100%</p> <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.		<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan x 100%</p> <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan</u> Jumlah Responden Pencari Keadilan x100%</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</u> Jumlah Perkara yang diputus x100%</p> <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah Jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari}}{\text{Jumlah Putusan yang menarik masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan: Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)}} \times 100\%$ <p>Catatan : Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan x 100%</p> <p>Catatan: Jumlah perkara yang diselesaikan outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p><u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)</u> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x100%</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<p><u>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</u> Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan x100%</p> <p>Catatan : Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4.	<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</p>	<p>e. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</p>	<p><u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u> Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%</p> <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

**INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1	Meningkatnya penyerapan anggaran DIPA 01 DIPA 04	Prosentase penyerapan anggaran yang di tindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah DIPA yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Realisasi Belanja DIPA untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya terlaksananya ketertiban laporan administrasi keuangan	Prosentase terlaksananya ketertiban laporan administrasi keuangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan administrasi keuangan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindaklanjut laporan administrasi keuangan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya terlaksananya ketertiban laporan administrasi BMN	Prosentase terlaksananya ketertiban laporan administrasi BMN	$\frac{\text{Jumlah Laporan administrasi BMN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindaklanjut laporan administrasi BMN untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Terealisasinya Kebersihan lingkungan kerja	Terealisasinya Kebersihan lingkungan kerja	$\frac{\text{Jumlah Laporan kebersihan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan kebersihan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya Tercapainya kedisiplinan pegawai.	Tercapainya kedisiplinan pegawai.	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya Tercapainya	Tercapainya pelaporan	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Tindak lanjut laporan untuk ditindaklanjuti}}$	Sekretaris	Laporan Bulanan

	pelaporan tahunan secara tepat waktu,	tahunan secara tepat waktu, Maksimal minggu pertama bulan Januari	(dieksekusi) x 100%		dan Laporan Tahunan
7	Meningkatnya Terealisasinya Pengawasan Bidang pada masing-masing unit.	Terealisasinya Pengawasan Bidang pada masing-masing unit.	<u>Laporan Pengawasan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u> Jumlah Tindaklanjut hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%	Sekretaris	Laporan triwulanan dan Laporan Semesteran



Ketua
Pengadilan Agama Ambarawa
ISHAK LUBIS, S.Ag
NIP.19690622.199703.1.001

